

## **Akselerasi Pembiayaan Bagi Wirausaha di Jawa Barat Melalui Survei *Database* Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID) - Bank Indonesia**

**Ning Wahyuni<sup>1</sup>, Sony Susanto<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stan Im, Bandung

<sup>2</sup>Program Studi Teknik Informatika, STMIK IM, Bandung

Email : ningwahyuni@stan-im.ac.id<sup>1</sup>

### **ABSTRAK**

Salah satu program Bank Indonesia untuk mendorong UMKM berdaya saing dan upaya mempercepat (akselerasi) pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dimana Bank Indonesia menetapkan tiga pilar kebijakan yaitu, korporatisasi, kapasitas dan pembiayaan. Kebijakan peningkatan akses pembiayaan sejalan dengan kebijakan makroprudensial yang bertujuan untuk mendorong intermediasi yang seimbang sehingga terwujudnya stabilitas system keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan internal untuk pengkinian database profil UMKM potensial dibiayai yang terdapat pada website Bank Indonesia secara regular dan terus menerus sebagai informasi awal bagi Lembaga Keuangan untuk asesmen kelayakan pembiayaan sehingga dapat meningkatkan penyaluran pembiayaan kepada UMKM melalui survei Database Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei sebagai proses untuk mengumpulkan data dengan menggunakan sampel dari populasi tertentu melalui wawancara dan questioner. Tujuan penelitian adalah untuk mendorong fungsi intermediasi, menyediakan informasi profil UMKM yang potensial dibiayai oleh Perbankan, dan rujukan informasi awal bagi pengguna. Hasil dari survei berupa data Profil UMKM yang potensial dibiayai oleh Perbankan sampai dengan Proyeksi Keuangan yang dapat di akses melalui website Bank Indonesia. Dengan tersedianya data profil UMKM dimaksud, diharapkan Perbankan dapat menggunakannya sebagai referensi dalam rangka mempercepat akses pembiayaan bagi UMKM yang membutuhkan pembiayaan dalam pengembangan usahanya.

**Kata Kunci** : Akselerasi, BISAID, Survei UMKM, Pembiayaan, Database Profil UMKM

### **ABSTRACT**

*One of Bank Indonesia's programs to encourage UMKM to be competitive and efforts to accelerate (accelerate) inclusive economic growth, where Bank Indonesia has established three policy pillars, namely, corporatization, capacity and financing. The policy of increasing access to financing is in line with macroprudential policy which aims to encourage balanced intermediation so as to achieve financial system stability that supports sustainable economic growth. In connection with this, Bank Indonesia has issued internal provisions for updating the profile database of potentially financed UMKM which is available on the Bank Indonesia website regularly and continuously as initial information for financial institutions to assess the feasibility of financing so that they can increase the distribution of financing to UMKM through surveys. Potent*

*ially Funded UMKM Profile Database (BISAID). This research uses a survey method as a process for collecting data using samples from a certain population through interviews and questionnaires with the aim of the research being to encourage the intermediation function, provide profile information on UMKM that have the potential to be financed by banking, and reference initial information for users. The results of the survey include data on the profile of UMKM that have the potential to be financed by banks as well as financial projections which can be accessed via the Bank Indonesia website. With the availability of the UMKM profile data in question, it is hoped that banks can use it as a reference in order to accelerate access to financing for UMKM that need financing to develop their business*

**Keywords :** *Acceleration, BISAID, UMKM Survey, Financing, UMKM Profile Database*

## 1. PENDAHULUAN

Ameia dalam (Pamungkas and Hidayatulloh 2019) menyatakan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak hanya menjadi penopang perekonomian di Indonesia, tetapi juga ASEAN. Berdasarkan data terdapat sekitar 88,8% sampai dengan 99,9% bentuk usaha di ASEAN adalah UMKM. Keberadaan UMKM ini mampu menyerap tenaga kerja mencapai 51,7% sampai dengan 97,2%. Dari beberapa hal tersebut, maka keberadaan UMKM di masa sekarang ini tidak selayaknya dipandang sebelah mata. (CAHYO, 2021). UMKM perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Pemerintah agar usaha yang dijalankannya dapat berkembang dan maju, yang pada akhirnya mampu meningkatkan Pendapatan Nasional Bruto Indonesia. Dalam upaya mendorong UMKM berkembang dan maju pada kenyataannya banyak dihadapkan pada permasalahan yang cukup kompleks, salah satu permasalahan UMKM adalah terbatasnya permodalan, untuk itu UMKM membutuhkan dukungan dari lembaga pembiayaan termasuk perbankan. Dari berbagai hasil studi ternyata akses sebagian besar UMKM terhadap perbankan masih terbatas. Permasalahan ini terkait dengan profil dari debitur-debitur usaha skala mikro yang kurang atau bahkan tidak *bankable* atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan teknis perbankan. Hal ini menyebabkan aspek kelayakan (*feasibility*) debitur dari usaha skala mikro terabaikan (Kantor Bank Indonesia Palembang, 2007) (Susilo, 2010).

Adanya permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM diatas dalam mendapatkan akses pembiayaan bersumber dari beberapa masalah yang sama yaitu masih kurangnya literasi keuangan, tidak terpenuhinya prinsip yang dipersyaratkan oleh lembaga keuangan (kemampuan, modal, jaminan, watak dan kondisi) serta

rendahnya pendidikan pelaku UMKM. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya pelaku UMKM kesulitan dalam mengakses pembiayaan dikarenakan pelaku UMKM dianggap kurang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan. Lebih lanjut, kondisi tersebut pada akhirnya memaksa UMKM mencari sumber pembiayaan ilegal melalui rentenir. Meskipun pinjaman ini tentu memiliki risiko ancaman kekerasan yang didapatkan oleh debitur UMKM apabila tidak dapat membayar tepat waktu. Disisi lain, ketidakmampuan membayar tepat waktu selain disebabkan oleh tingginya bunga yang diterapkan pinjaman ilegal, tetapi juga oleh lemahnya kemampuan UKM dalam mengelola keuangannya, membuat banyak UKM tidak mampu memenuhi kewajibannya sehingga terjadi kredit macet (Wibowo, 2023). Melihat kenyataan tersebut aspek pembiayaan menjadi penting karena perkembangan pelaku UMKM di Indonesia terhambat akibat minimnya pembiayaan, terlebih lagi setelah Pandemi Covid-19 yang menghantam Indonesia sejak Maret 2020 (Perdana, 2021). Sulitnya akses bagi usaha menengah, kecil, dan mikro atau UMKM untuk memperoleh kredit dinilai menyebabkan rasio wirausaha Indonesia sangat kecil hanya 3,1 persen dari jumlah penduduk, kondisi itu tak lepas dari sulitnya pelaku UMKM untuk memperoleh kredit usaha. Berdasarkan riset *Ease of Doing Business 2020*, Indonesia menempati peringkat ke-48 dalam hal kemudahan mendapatkan kredit bagi UMKM, sejajar dengan Thailand. Lain halnya, Malaysia berada di peringkat ke-37, lalu Vietnam dan India di peringkat ke-25. Kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan, terlebih perekonomian Indonesia sangat ditopang oleh UMKM (Merliyana, 2022).

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (agent of development) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan (Kara, 2013).

Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang mengkoordinir perbankan di Indonesia berupaya memberikan kontribusi terbaik untuk terus meningkatkan peran UMKM dalam perekonomian dengan mendorong Perbankan untuk lebih memperhatikan dan peduli dengan permasalahan UMKM dalam segi pembiayaan. Pengembangan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia diselaraskan dengan bidang tugas Bank

Indonesia dan sejalan dengan visi, misi, dan program strategis Bank Indonesia, dimana salah satu fokusnya adalah meningkatkan akses keuangan UMKM untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dengan melaksanakan survei Database Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID) yang bertujuan untuk mendorong fungsi intermediasi dan mempercepat akses layanan keuangan kepada UMKM melalui Perbankan Nasional. Akselerasi pembiayaan dan investasi termasuk membuka akses KUR seluas luasnya bagi UMKM merupakan salah satu dari enam (6) program strategis menjadi prioritas pemerintah selama periode 2020-2024 yang memberikan kemudahan bagi dukungan permodalan usaha. (Hamdani, 2021).

Survei BISAID yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia, adalah upaya Bank Indonesia dikarenakan masih banyaknya UMKM yang memiliki kendala, baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun untuk mengembangkan usahanya. Dari sisi pembiayaan, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya, baik karena kendala teknis, sebagai contoh tidak mempunyai/tidak cukup agunan, maupun kendala nonteknis, misalnya keterbatasan akses informasi ke perbankan. Dari sisi pengembangan usaha, pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan untuk komoditas tertentu. Di sisi lain, perbankan juga membutuhkan informasi tentang komoditas yang potensial untuk dibiayai. Hal ini juga didukung oleh adanya fakta bahwa salah satu dari lima permasalahan UMKM di Indonesia adalah akses pembiayaan bagi UMKM yang masih rendah berdasarkan catatan Bappenas, dan mengacu pada data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2019, ada 88 persen UMK tidak memperoleh atau mengajukan kredit. Adapun rasio kredit UMKM di perbankan terhadap total kredit perbankan baru 20 persen (Merliyana, LITERASI PEMBIAYAAN UMKM, 2022). Meskipun rasio kredit UMKM ini telah meningkat ditahun 2022 menjadi 21,44% (BI, 2022), akan tetapi peningkatannya belum cukup signifikan, hal ini dikarenakan sektor produktif masih dilihat sebagai usaha berisiko tinggi dan rendahnya literasi keuangan di kalangan UMKM. Kegiatan UMKM juga dianggap tidak feasible serta sulitnya UMKM dalam melengkapi persyaratan administratif pembiayaan formal (Kristianus, 2021). Untuk meningkatkan rasio kredit mencapai porsi kredit/pembiayaan sebesar 30% pada tahun 2024 sesuai arahan Bapak Preseiden Republik Indonesia, kebijakan Bank Indonesia dari sisi supply dilakukan dengan menerbitkan pengaturan pembiayaan

inklusif Makroprudential melalui PBI No.23/13/PBI/2021 tentang rasio pembiayaan inklusif Makroprudential bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan PBI No.24/3/PBI/2022. Melalui penerbitan PBI PRIM tersebut diharapkan dapat mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas melalui peningkatan akses pembiayaan inklusif dan pengembangan UMKM dengan memperluas cakupan pembiayaan kredit sesuai keahlian dan model bisnis bank (BI, 2022).



**Gambar 1:** Rasio Kredit UMKM Oleh Perbankan

Dalam rangka mendorong intermediasi perbankan kepada sektor riil dan UMKM, salah satu upaya yang dilakukan Bank Indonesia adalah dengan menyediakan informasi data profil UMKM yang tidak sedang mendapatkan pembiayaan perbankan, namun membutuhkan kredit/pembiayaan dalam rangka pengembangan usahanya. Kajian Otoritas Jasa Keuangan bersama BCG (2020) menunjukkan kemudahan akses pembiayaan menjadi salah satu kunci UMKM dapat tumbuh dan berkembang (Damanik, 2021). Dengan tersedianya data profil UMKM yang menyajikan data informasi pengusaha (nama perusahaan, lama usaha, alamat, dll) serta data usaha yang antara lain mencakup informasi kegiatan usaha, tingkat persaingan usaha, total aset, rata-rata penjualan per tahun, proyeksi pertumbuhan, kebutuhan pembiayaan, taksiran aset untuk jaminan kredit serta jumlah dokumen persyaratan kredit sampai dengan data keuangan usaha (neraca, laba rugi, *cashflow*), dapat memberikan manfaat bagi perbankan untuk meningkatkan pembiayaan terhadap UMKM. Bagi UMKM itu sendiri sebagai upaya

mempercepat akses pembiayaan serta sebagai sarana informasi dan pengetahuan untuk mengembangkan usahanya.

### **Tujuan Survei Database Profil UMKM Potensial Dibiayai**

Pelaksanaan survei database profil UMKM potensial dibiayai bertujuan untuk :

1. Mendorong fungsi Intermediasi
2. Menyediakan informasi profil UMKM potensial dibiayai (tidak sedang mendapatkan pembiayaan) melalui website milik Bank Indonesia sehingga dapat digunakan oleh lembaga keuangan bank dan bukan bank dalam mendorong fungsi intermediasi dan mempercepat akses layanan keuangan kepada UMKM
3. Menjadi rujukan informasi awal kondisi UMKM potensial dibiayai dalam rangka program pengembangan ke depan:
  - a. Profil usaha meliputi kinerja keuangan dan potensi sumber daya UMKM
  - b. Aspek pemasaran UMKM meliputi penjualan dalam negeri dan/atau luar negeri
  - c. Informasi kelengkapan dokumen usaha sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan;
  - d. Informasi kebutuhan pembiayaan berupa modal kerja atau investasi

## **2. METODE**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode survei yaitu metode riset dengan menggunakan kuisioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang mewakili populasi tertentu. (Ardian, Sikap Masyarakat Surabaya Terhadap Program Acara "Pesbukers" di ANTV, 2013).

### **Metodologi Survei**

- a. Survei dilaksanakan dengan cara wawancara langsung kepada responden (pemilik/pengelola) UMKM terpilih;

Teknik wawancara yang digunakan berupa gabungan antara wawancara personal dan wawancara telepon (Hartono, 2007). Wawancara personal dilakukan melalui tatap muka langsung dengan responden. Peneliti mengkonfirmasi jawaban responden dengan melakukan wawancara ulang melalui telepon. Selain itu, untuk menghindari terjadinya jawaban yang tidak benar dari responden, peneliti

melakukan teknik probing. Probing adalah teknik untuk menstimulasi responden menjawab lebih banyak dan lebih relevan (Wirjono, 2012)

- b. Secara umum kuesioner terdiri dari :
  - i. Profil UMKM
  - ii. Informasi Keuangan
  - iii. Informasi asset yang dimiliki
  - iv. Informasi kebutuhan pembiayaan
  - v. Informasi dokumen pendukung dalam rangka pengajuan pembiayaan
- c. Dalam survei ini, dasar pencatatan keuangan adalah *cash basis gross* yaitu pencatatan berdasarkan jumlah nominal kas yang diterima atau dikeluarkan. Hal ini untuk memudahkan proses pencatatan UMKM yang masih memiliki pencatatan keuangan sederhana.

### **Ruang Lingkup dan Cakupan Survei**

- A. Responden survei merupakan pelaku UMKM dengan kriteria sesuai Peraturan Pemerintah (PP) no 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (JDIH BPK – peraturan.bpk.go.id), yaitu :
  - a. Usaha Mikro adalah usaha dengan kriteria modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 atau satu miliar Rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan/atau memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah).
  - b. Usaha Kecil adalah usaha dengan kriteria modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan/atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Ru[pia]h) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar Rupiah).
  - c. Usaha Menengah adalah usaha dengan kriteria modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah)
- B. Penentuan sektor ekonomi UMKM mengacuk pada Klalsifikasi Baku Lapa- ngan Usaha Indonesia (KBLI) terkini yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

- C. UMKM yang menjadi responden survei adalah UMKM potensial untuk dibiayai, dengan kriteria :
- a. Telah menjalankan usaha minimal 3 (tiga) tahun
  - b. Responden tidak sedang mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan bukan bank pada saat pelaksanaan survei.
  - c. Responden membutuhkan pembiayaan untuk pengembangan usaha
  - d. Memiliki pencatatan transaksi keuangan sederhana
  - e. Memiliki kelengkapan dokumen persyaratan pembiayaan

### **Tahapan Pelaksanaan Survei**

- a. Melakukan sampling responden berdasarkan metode yang telah ditetapkan
- b. Melaksanakan pengumpulan informasi menggunakan metode *in-depth interview* (tatap muka) dengan mengunjungi responden dengan panduan daftar pertanyaan sesuai kuesioner yang telah disediakan.
- c. Menyampaikan cinderamata dari Bank Indonesia kepada responden yang telah berhasil diwawancarai dan memberikan data-data yang reliabel.
- d. Verifikasi data yang meliputi cleansing data hasil wawancara, antara lain berupa:
  - i. Konfirmasi kewajaran dan kelengkapan data;
  - ii. Melakukan proses callback bagi data yang kurang logis (apabila ada);
  - iii. Melakukan proses survei ulang bagi data yang tidak dapat digunakan (apabila ada);
  - iv. Rekonfirmasi dan cleaning dilakukan sampai data dinyatakan sudah dapat dilakukan approval pengunggahan data pada aplikasi BISAID.
- e. Melakukan penginputan hasil survei melalui aplikasi BISAID yang telah disediakan.
- f. Pelaporan pelaksanaan survei

### **Penerapan *Quality Control* (QC)**

- a. Pelaksanaan *Quality Control* oleh Pelaksana Survei Database Profil UMKM Potensial Dibiayai.  
Reviewer bertugas memeriksa kelengkapan dan kewajaran data, baik secara matematis maupun logis. Apabila ditemukan data yang tidak wajar (termasuk jika posisi awal tahun ini tidak sama dengan posisi akhir tahun sebelumnya), maka

supervisor wajib mengatur pelaksanaan call back atau kunjungan ulang kepada responden untuk konfirmasi jawaban data hasil surei.

- b. Pelaksanaan *Quality Control* oleh Bank Indonesia
- c. KPw BI Jawa Barat akan melakukan pengawasan dan control terhadap teknis pelaksanaan survei dan memastikan proses verifikasi survey berjalan dengan semestinya, baik oleh supervisor maupun surveyor. Jika terdapat data yang dianggap tidak wajar, Pelaksana wajib memperbaiki atau menyempurnakan data.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut hasil pelaksanaan survei Database Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID) untuk wilayah Jawa Barat periode tahun 2023 yang terdiri dari wilayah Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Kawarang dan Kota Bandung.

#### **Persiapan**

##### **Pengajuan Penawaran dan Penandatanganan Kontrak**

Pengajuan penawaran dilakukan oleh Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) DPW Jawa Barat pada bulan Januari 2023. Selanjutnya dilakukan negosiasi atas penawaran ABDSI dan diikuti penandatanganan SPK yang berlangsung pada tanggal 10 Maret 2023. Surat perintah kerja (SPK) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan BISAID pada Bank Indonesia KPW Jawa Barat oleh ABDSI DPW Jawa Barat.



**Gambar 2:** Pertemuan dengan Bank Indonesia KPW Jawa Barat

### **Pengajuan Calon Responden**

Berdasarkan kriteria yang tertuang pada kerangka acuan kerja (KAK), untuk mendapatkan calon responden sesuai kriteria, maka dilakukan proses seleksi berdasarkan hasil Informasi Debitur (Ideb) yang didapat melalui SLIK OJK. Pada tahapan ini tim surveyor mengajukan data calon responden kepada KPW Bank Indonesia, yang selanjutnya KPW Bank Indonesia melakukan pengecekan Ideb dan menyerahkan data tersebut kepada tim survey. Proses menjaring calon responden dilakukan melalui google form yang dibagikan kepada para ketua DPD ABDSI pada kabupaten/Kota terpilih. Adapun google form ini oleh ketua DPD ABDSI dibagikan kepada anggota ABDSI yang merupakan pendamping pada beberapa program pendampingan UMKM. Tetapi selain itu, gform ini dibagikan kepada pelaku usaha mikro kecil yang dalam dampingan ABDSI diluar program pendampingan kedinasan.

Berikut rekapitulasi jumlah calon responden yang diajukan untuk menjadi calon responden, per kabupaten. Sebagaimana disajikan pada tabel 1:

**Tabel 1.** Jumlah Calon Responden per Kabupaten/Kota

| No           | Kabupaten/Kota     | Jumlah Calon Responden yang dapat diwawancarai sesuai kriteria di SLIK OJK |
|--------------|--------------------|--|
| 1            | Kabupaten Bandung  | 74   |
| 2            | Kota Bandung       | 6  |
| 3            | Kabupaten Garut    | 42   |
| 4            | Kabupaten Bogor    | 25   |
| 5            | Kabupaten Sukabumi | 23   |
| 6            | Kabupaten Karawang | 45   |
| <b>TOTAL</b> |                    | <b>215</b>   |

*Sumber : Data diolah (2023)*

### Verifikasi data responden berdasarkan hasil Ideb.

Berdasarkan hasil Ideb, selanjutnya dilakukan seleksi responden dengan kriteria sebagai berikut :

1. Pelaku usaha tidak sedang mendapatkan pembiayaan
2. Pelaku usaha dinyatakan memiliki rekam jejak baik dalam aktivitas perbankan.

Informasi tersebut diperoleh dari Ideb OJK, dengan melihat rekaman pembiayaan dan kualitas pembiayaan. Maka dipilihlah calon responden yang sedang tidak mengajukan pembiayaan dan memiliki kualitas pembiayaan di angka 1. Berdasarkan data Ideb, pelaku usaha yang dapat diwawancarai di setiap kabupaten adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Jumlah Calon Responden yang Dapat Diwawancarai Berdasarkan Kriteria SLIK OJK

| No           | Kabupaten/Kota | Jumlah Calon Responden yang diwawancarai sesuai kriteria di SLIK OJK |           |           |
|--------------|----------------|--|-----------|-----------|
|              |                | Laki-Laki  | Perempuan | Total     |
| 1            | Kab Bandung    | 9  | 11        | 19        |
| 2            | Kota Bandung   | 1  | 2         | 3         |
| 3            | Kab Garut      | 10   | 7         | 17        |
| 4            | Kab Bogor      | 3  | 7         | 10        |
| 5            | Kab Sukabumi   | 7  | 6         | 13        |
| 6            | Kab Karawang   | 7  | 6         | 13        |
| <b>TOTAL</b> |                | <b>37</b>  | <b>39</b> | <b>75</b> |

*Sumber : Data diolah (2023)*

Adapun berdasarkan data di Tabel 2, tidak semua calon responden dapat diwawancarai. Beberapa diantaranya dalam proses wawancara tidak jadi melanjutkan

proses survei atau tidak bersedia diwawancarai. Alasan responden tidak bersedia diwawancarai karena :

1. Tidak mendapatkan izin dari pasangan
  2. Tidak jadi mengajukan pembiayaan
  3. Pada saat proses wawancara baru mendapatkan pembiayaan dari perbankan
- Dari total 72 calon responden, terdapat 57 orang yang kemudian melanjutkan proses wawancara. Sebaran calon responden yang diwawancarai berdasarkan kabupaten/kota serta jenis kelamin disajikan pada tabel 3. Jumlah responden yang semula direncanakan adalah 10 responden untuk setiap Kabupaten/Kota, kemudian berubah komposisinya. Dikarenakan ada beberapa calon responden yang tidak memungkinkan diwawancarai karena alasan yang sudah disampaikan sebelumnya. Sehingga ada beberapa wilayah yang jumlah respondennya lebih dari 10 untuk memenuhi total jumlah responden yang telah disepakati sesuai SPK.

**Tabel 3.** Jumlah Calon Responden yang Diwawancarai Berdasarkan Kriteria SLIK OJK

| No           | Kabupaten/Kota | Jumlah Calon Responden yang diwawancarai sesuai kriteria di SLIK OJK |           |           |
|--------------|----------------|--|-----------|-----------|
|              |                | Laki-Laki  | Perempuan | Total     |
| 1            | Kab Bandung    | 8  | 11        | 19        |
| 2            | Kota Bandung   | 1  | 1         | 2         |
| 3            | Kab Garut      | 5  | 7         | 12        |
| 4            | Kab Bogor      | 3  | 7         | 10        |
| 5            | Kab Sukabumi   | 2  | 4         | 6         |
| 6            | Kab Karawang   | 3  | 5         | 8         |
| <b>TOTAL</b> |                | <b>22</b>  | <b>35</b> | <b>57</b> |

*Sumber : Data diolah (2023)*

Berdasarkan penjarangan data, calon responden adalah dampingan ABDSI yang sebagian besar masuk kategori usaha mikro dan sebagian kecil masuk dalam kategori usaha kecil. Sehingga data pelaku usaha yang mengisi, sebagian besar memiliki pendapatan kurang dari Rp 2 Milyar/tahun. Adapun responden terbanyak memiliki pendapatan Rp 100.000.000- Rp 1 milyar pada tahun 2022, sebanyak 32 orang. Jika dilakukan kategorisasi berdasarkan data pada tabel 4, maka profil responden berdasarkan pendapatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.** Jumlah Responden Berdasarkan Pendapapatan Tahunan di Tahun 2022

| No.          | Pendapatan Tahunan             | Jumlah Responden (Org) |
|--------------|--------------------------------|------------------------|
| 1            | < 100.000.000                  | 10                     |
| 2            | >100.000.000 – 500.000.000     | 32                     |
| 3            | >500.000.000 – 1.000.000.000   | 6                      |
| 4            | >1.000.000.000 – 2.000.000.000 | 5                      |
| 5            | >2.000.000.000                 | 4                      |
| <b>TOTAL</b> |                                | <b>57</b>              |

*Sumber : Data diolah (2023)*

Adapun berdasarkan kegiatan usaha, responden yang mengikuti survei BISAID, sebagian besar adalah industri pengolahan, sebanyak 44 orang dari 57 orang responden. Selain industry pengolahan, terdapat 4 kelompok usaha lainnya yang menjadi responden pada survei BISAID. Secara rinci, kategori usaha dapat dilihat pada tabel 5.

**Tabel 5.** Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Usaha

| No.          | Kelompok Usaha                                    | Jumlah Responden (Org) |
|--------------|---|------------------------|
| 1            | Aktivitas Jasa Lainnya                            | 3                      |
| 2            | Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivi-tas Sosial | 1                      |
| 3            | Industri Pengolahan                               | 44                     |
| 4            | Penyedia Akomodasi an Penyedia Mak-an dan Minum   | 5                      |
| 5            | Perdagangan Besar dan Ecer                        | 3                      |
| 6            | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                | 1                      |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>57</b>              |

*Sumber : Data diolah (2023)*

### **Pelaksanaan Wawancara**

Kegiatan wawancara dimulai sejak bulan Mei 2023, dikarenakan para respon- den yang juga pelaku usaha banyak memiliki kesibukan sampai dengan hari raya Idul Fitri. Kegiatan survey kemudian berlangsung hingga awal September 2023. Hal ini dikarenakan adanya calon responden yang kemudian tidak bersedia diwawancarai maupun saat proses wawancara sudah mendapatkan pembiayaan. Walaupun pada saat SLIK OJK diajukan, yang bersangkutan tidak tercatat memiliki pembiayaan usaha. Wawancara dilakukan dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha. Lokasi usaha peserta yang berada di Kabupaten sangat tersebar, sehingga bagi para surveyor

membutuhkan waktu tempot yang cukup lama. Sebaran responden yang paling baragam adalah di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sukabumi. Proses wawancara untuk kegiatan BISAID ini dilakukan beberapa kali, khususnya pada saat melakukan konfirmasi data keuangan. Untuk proses konfirmasi, responden selanjutnya dikumpulkan di satu tempat per Kabupaten/Kota. Jika masih ada data yang dirasa belum cukup, maka dilakukan kembali konfirmasi melalui telpon.



**Gambar 3:** Pelaksanaan Wawancara di Kabupaten Sukabumi

#### **Hambatan dan Pembahasan**

Pada survei IDEB ini terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Kendala-kendala tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya kekhawatiran dari responden bahwa datanya akan disalah gunakan. Sehingga ada lebih dari 10 orang responden yang menolak untuk diwawancarai,
2. Responden yang sudah terpilih ternyata memperoleh pembiayaan tepat sebelum proses wawancara dilaksanakan,
3. Lokasi yang sangat tersebar, khususnya pada kabupaten-kabupaten yang sebarannya luas. Diantaranya adalah Kabupaten Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.
4. Banyak pelaku usaha yang enggan untuk menjadi responden dikarenakan khawatir riba. Bahkan ada yang semula sudah mengisi form kesediaan menjadi calon responden dan sudah diajukan SLIK OJK dan lolos, kemudian menolak menjadi responden.

#### **4. SIMPULAN**

Pembiayaan menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan aktivitas usaha mikro dan kecil. Tetapi berkaitan dengan pembiayaan dari perbankan, tidak semua

pelaku usaha dapat memenuhi persyaratan yang dipenuhi. Termasuk juga dalam hal pemenuhan persyaratan perbankan yaitu bersih dalam portofolio pembiayaan yang dibuktikan dalam bentuk SLIK OJK. Dari 215 pelaku usaha yang mengisi g-form dan diajukan SLIK OJK nya, terdapat 75 orang yang dinyatakan aman dan dapat mengajukan pembiayaan. Sebagian besar responden adalah pelaku usaha mikro dengan pendapatan dibawah Rp 2 milyar per tahun, berdasarkan pembagian UMKM yang terdapat pada PP No 7 tahun 2021 Tentang perlindungan dan Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Berdasarkan skala usaha, responden terbanyak adalah dari industry pengolahan sebanyak 44 orang reponden. Adapun 13 responden lainnya tersebar pada berbagai kelompok usaha. Final hasil survey didapat 57 pelaku usaha mikro dan kecil yang telah lolos verifikasi data dan laporan keuangan secara lengkap dan data telah terinput semua pada aplikasi BISAID Bank Indonesia.

Berdasarkan hasil survey, sebagian besar responden berharap akan mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan, sehingga perlu dilanjutkan dengan fasilitasi akses pembiayaan dengan segera. Survei ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan program lain yang berkaitan dengan keuangan, diantaranya adalah pendampingan pelaporan keuangan serta pendidikan literasi keuangan pada pelaku usaha mikro dan kecil. Sehingga melalui kegiatan ini pelaku usaha yang mendapatkan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan termasuk akses pembiayaan menjadi meningkat.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- ABDSI DPW Jawa Barat, (15 September 2023). Laporan Survei BISAID
- Ardian, M. (2013). SIKAP MASYARAKAT SURABAYA TERHADAP PROGRAM ACARA "PESBUKERS" DI ANTV. *JURNAL E-KOMUNIKASI* , VOL I. NO.1, 6
- Azizah, N. (19 Februari 2021). Lima Permasalahan UMKM Indonesia. *Medcom*. Diak-ses dari : <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/zNPZz5Vk-lima-permasalahan-umkm-indonesia>
- Bagaskara, Metode Survey dalam Penelitian: Definisi, Jenis dan Contoh. *Mutu Internasional*. Diakses dari : <https://mutucertification.com/memahami-metode-survey/>
- CAHYO, A. D. (2021, November). PERAN PERBANKAN DALAM PEMBIAYAAN UMKM DI TENGAH PANDEMI COVID-19. *Jurnal Fidusia Volume 4 No 2*, 139.
- Damanik, R. (4 Agustus 2021). "Holding" Mikro dan Koperasi. *DetikNews*.

Diakse dari : <https://news.detik.com/kolom/d-5668809/holding-mikro-dan-koperasi>

Database Profil UMKM Potensial Dibiayai (BISAID). KKI - *Bank Indonesia*. Diakses dari : <https://www.karyakreatifindonesia.co.id/database-profil-umkm-potensial-dibiayai-bisaid->

Framework Pengembangan UMKM Bank Indonesia. *Bank Indonesia*. Diakses dari : <https://www.bi.go.id/id/umkm/program-pengembangan-umkm/default.aspx>

Hamdani1, J. F. (2021). FASILITASI AKSES PEMBIAYAAN BAGI PELAKU UMKM TERDAMPAK COVID-19 DI BANDA ACEH. *JPMN*, 15.

Kajian Model Bisnis *Multichannel Financing*, Publikasi – Bank Indonesia. *Departmen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen (17 Februari 2023)*.

Diakses dari: <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Pages/Kajian-Model-Bisnis-Multichannel-Financing.aspx>

Kara, M. (2013). KONTRIBUSI PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP. *Ahkam: Vol. XIII, No. 2,* 315.

Kristnus, A. (25 Februari 2021). Teten Tekankan Pentingnya Literasi KeuanganUMKM untuk Pembiayaan Usaha. *Investor.id*. Diakses dari : <https://investor.id/business/238872/teten-tekankan-pentingnya-literasi-keuangan-umkm-untuk-pembiayaan-usaha>

Merliyana, A. S. (2022). LITERASI PEMBIAYAAN UMKM. *PROGRESIF, Vol 2, No. 1,* 72.

Perdana, R. (28 Januari 2021). Pentingnya Akses Sumber Pembiayaan Bagi Perkembangan UMKM. *Pikiran Rakyat*, Diakses dari : <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-131341590/pentingnya-akses-sumber-pembiayaan-bagi-perkembangan-umkm?page=all>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *JDIH - BPK* Diakses dari : <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>

P o l a Pembiayaan. Akses Pembiayaan UMKM - *Bank Indonesia*. Diakses dari : <https://www.bi.go.id/id/umkm/pembiayaan/Default.aspx>

Pratama, WP. (1 Mei 2021). Klasik! Sulitnya Akses Permodalan Jadi Kendala PengembanganUMKM. *Bisnis.com*. Diakses dari :

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20210501/12/1388975/klasik-sulitnya-akses-permodalan-jadi-kendala-pengembangan-umkm>

Profil UMKM Yang Potensial Dibiayai Oleh Perbankan. Database UMKM - *Bank Indonesia*. Diakses dari : <https://www.bi.go.id/bisaid>

Susilo, Y. S. (2010). PERAN PERBANKAN DALAM PEMBIAYAAN UMKM. *Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 14, No. 3,* 468.

- Wibowo, A. P. (2023). PENGUATAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara* 8(1), pp. 1-19, 3.
- Wirjono1, E. R. (2012). SURVEI PEMAHAMAN DAN PEMANFAATAN INFORMASI AKUNTANSI DALAM USAHA KECIL MENENGAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *AUDI - Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 2011-2012.